

**PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF
DI PROVINSI PAPUA**



Proposal Skripsi Oleh:

ARDIKA RAHMASIWI

01021281924073

Ekonomi Pembangunan

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2023

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF DI PROVINSI PAPUA

Disusun Oleh,

Nama : Ardika Rahmasiwi

NIM : 01021281924073

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Bidang Kajian/Konsentrasi : Ekonomi Regional

Telah disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan

DOSEN PEMBIMBING

Tanggal : 16 Oktober 2023



Dr. Sukanto, S.E., M.Si

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF DI PROVINSI PAPUA

Disusun Oleh,

Nama : Ardika Rahmasiwi
NIM : 01021281924073
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Ekonomi Regional

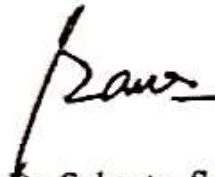
Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 8 November 2023 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif

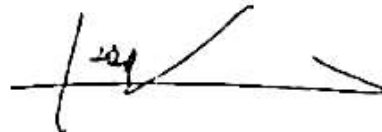
Palembang, 10 November 2023

Anggota

Ketua



Dr. Sukanto, S.E., M.Si
NIP. 197403252009121001



Mardalena, S.E., M.Si
NIP. 197804212014092004

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 19730406201021001

ASLI
JUR. EK. PEMBANGUNAN 15-11-2023
FAC. ULT. EKONOMI UNSRI

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ardika Rahmasiwi

NIM : 01021281924073

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Bidang Kajian : Ekonomi Regional

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Papua".

Pembimbing : Dr. Sukanto, S.E., M.Si

Anggota : Mardalena, S.E., M.Si

Tanggal Ujian : 8 November 2023

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Indralaya, 12 November 2023

Pembuat Pernyataan



Ardika Rahmasiwi

NIM.01021281924073

ASLI
JUR. EK. PEMBANGUNAN 15-11-2023
FACULTAS EKONOMI UNSRI

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Provinsi Papua” sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Program Strata Satu (S1) Ekonomi Pembangunan di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga dapat berguna baik bagi penulis sendiri maupun pembaca pada umumnya.

Penulis berharap dengan disusunnya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya kepada para akademisi, pemerintah, mahasiswa-mahasiswa dan masyarakat luas pada umumnya serta para produsen yang berkepentingan.

Indralaya, 12 November 2023

Pembuat Pernyataan



Ardika Rahmasiwi

NIM.01021281924073

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai hambatan dan rintangan namun pada akhirnya hambatan dan rintangan dapat dilalui berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada saya selaku hamba-Nya sehingga diberikan kesabaran dan kemudahan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi.
2. Kedua orang tuaku tercinta, Ibunda Siti Arbaatun dan Ayahanda Muji yang tak pernah lelah memberikan support dan selalu mengusahakan yang terbaik untuk memenuhi semua yang dibutuhkan serta terus mendoakan agar diberikan kemudahan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi.
3. Kakakku tersayang Samapta Probowisnu yang senantiasa mendoakan dan memberikan support untuk menyelesaikan skripsi.
4. Adikku tersayang Kharimam Adiwiyata yang senantiasa mendoakan dan memberikan support untuk menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Mukhlis, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Sri Andayani S.E., M.S.E selaku Dosen Pembimbing Akademik.

9. Bapak Dr. Sukanto, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan, saran, dan kritikan selama penyusunan skripsi agar menjadi lebih baik.
10. Ibu Mardalena, S.E., M.Si selaku Dosen Penguji Seminar Proposal Skripsi dan Penguji Ujian Komprehensif yang telah membantu memberikan kritik dan saran untuk penyelesaian skripsi.
11. Seluruh Bapak/Ibu dosen yang telah bersedia memberikan pemahaman materi selama penulis menjalani proses perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
12. Seluruh staff dan pegawai tata usaha Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Indralaya, 12 November 2023

Pembuat Pernyataan



Ardika Rahmasiwi

NIM.01021281924073

ABSTRAK

PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF PROVINSI PAPUA

Oleh :

Ardika Rahmasiwi; Sukanto

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertumbuhan ekonomi inklusif di Provinsi Papua tahun 2017-2021. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Papua. Inklusivitas pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini mengacu pada variabel pokok yang digunakan oleh *Asian Development Bank*. Pengukuran kualitas pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari indeks pertumbuhan ekonomi inklusif. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata skor pertumbuhan indeks pertumbuhan ekonomi inklusif di Provinsi Papua tahun 2017-2021 sebesar 2,37. Angka tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi inklusif di Provinsi Papua bersifat tidak memuaskan.

Kata Kunci : IGI, Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya



Dr. Mukhlis, S.E., M.S.i

NIP. 197304062010121001

Dosen Pembimbing



Dr. Sukanto, S.E., M.Si

NIP. 197403252009121001

ABSTRACT

INCLUSIVE ECONOMIC GROWTH OF PAPUA PROVINCE

By :

Ardika Rahmasiwi; Sukanto

This research aims to analyze inclusive economic growth in Papua Province in 2017-2021. This research uses secondary data sourced from the Papua Central Statistics Agency. The inclusiveness of economic growth in this research refers to the main variables used by the Asian Development Bank. Measuring the quality of economic growth can be seen from the inclusive economic growth index. The research results show that the average growth score for the inclusive economic growth index in Papua Province in 2017-2021 was 2.37. These figures show that inclusive economic growth in Papua Province is not satisfactory.

Keywords: IGI, Economic Growth, Inclusive Economic Growth

Knowing.

Head of Economic Development Program



Dr. Mukhlis, S.E., M.S.i

NIP. 197304062010121001

Advice



Dr. Sukanto, S.E., M.Si

NIP. 197403252009121001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP		
	Nama	Ardika Rahmasiwi
	NIM	01021281924073
	Tempat/Tanggal Lahir	Tenang Waras / 16 Agustus 2001
	Alamat	Dusun II Desa Putak, Kec. Gelumbang, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan
	Handphone	081218350256
Agama	Islam	
Jenis Kelamin	Perempuan	
Status Perkawinan	Belum Kawin	
Kewarganegaraan	Indonesia	
Tinggi	168 cm	
Berat Badan	58 kg	
E-mail	ardikarahmasiwi@gmail.com	
PENDIDIKAN FORMAL		
2007-2013	SD Negeri 18 Gelumbang	
2013-2016	SMP Negeri 1 Gelumbang	
2016-2019	SMA Negeri 1 Indralaya Utara	
2019-2023	Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya	
PENGALAMAN ORGANISASI		
Karang Taruna Karang Rejo sebagai Sekretaris		
Unit Riset dan Edukasi (UREAD) sebagai Anggota Divisi Kreasi dan Inovasi		
Komunitas Edukasi Ilmah Ekonomi (KEIMI) sebagai Anggota Divisi HRD		

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF.....	ii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan teori	10
2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi	10
2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Inklusif.....	13
2.1.3 Indikator Pembentuk pertumbuhan Ekonomi Inklusif.....	17
2.1.4 Konsep Kesejahteraan.....	18

2.2 Penelitian Terdahulu	20
2.3 Kerangka Pemikiran.....	24
2.4 Hipotesis.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	26
3.2 Jenis dan Sumber data.....	26
3.3 Metode.....	27
3.4 Teknik Analisis	27
3.4.1 Pemilihan Bobot Variabel.....	27
3.4.2 Normalisasi Data Awal	27
3.4.3 Perhitungan Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	28
3.4.4 Penentuan Pencapaian.....	28
3.5 Definisi Operasional Variabel dan pengukuran variabel	29
3.5.1 Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	29
3.5.2 Pertumbuhan Ekonomi.....	29
3.5.3 Tenaga Kerja	29
3.5.4 Infrastruktur Ekonomi.....	29
3.5.5 Kemiskinan	29
3.5.6 Ketimpangan (Ratio Gini).....	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	30
4.1. Hasil Penelitian.....	30
4.1.1. Deskripsi Objek Penelitian.....	30
4.1.2 Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Papua.....	33

4.1.3 Tenaga Kerja di Provinsi Papua.....	35
4.1.4 Tingkat Konektivitas Antar Wilayah di Provinsi Papua.....	37
4.1.5 Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Papua.....	39
4.1.6 Gini Ratio di Provinsi Papua.....	40
4.1.7 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua kurang Memuaskan.....	42
4.1.8 Dimensi Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja, dan Infrastruktur Ekonomi.....	43
4.1.9. Dimensi Kemiskinan, dan Ketimpangan Pendapatan.....	44
4.2 Pembahasan.....	46
4.2.1 Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Papua.....	46
4.2.2 Kebijakan Pemerintah Untuk Mengatasi Ketimpangan Yang Terjadi Di Papua.....	51
BAB V KESIMPULAN & SARAN	59
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2. Rekomendasi Hasil Analisis	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	24
Gambar 4. 1 Peta Papua	30
Gambar 4. 2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua.....	34
Gambar 4. 3 TPAK Provinsi Papua	36
Gambar 4. 4 Tingkat Konektivitas Antar Wilayah Provinsi papua	38
Gambar 4. 5 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Papua... ..	39
Gambar 4. 6 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Papua.....	40
Gambar 4. 7 Gini Ratio Provinsi Papua	41

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Dimensi, Sub-Dimensi, dan Indikator Pembentuk IGI.....	18
Tabel 3. 1 Klasifikasi Pencapaian IGI.....	28
Tabel 4. 1 Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota (km ²).....	31
Tabel 4. 2 Indeks IGI Provinsi Papua , 2017-2021	42
Tabel 4. 3 Nilai dan Capaian Indikator Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja Produktif, dan Infrastruktur Ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2017-2021	44
Tabel 4. 4 Nilai dan Capaian Sub Dimensi Kemiskinan & Ketimpangan Provinsi Papua Tahun 2017-2021	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Laju PDRB Parovinsi Papua.....	65
Lampiran 2. Tingkat partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Papua.....	65
Lampiran 3. Persentase Tingkat Konektivitas Antar Wilayah Provinsi Papua.....	65
Lampiran 4. Persentase Kemiskinan Provinsi Papua.....	65
Lampiran 5. Gini Ratio	66
Lampiran 6. Nilai Capaian Nilai Sub Dimensi Pembentuk IGI.....	66
Lampiran 7. Hasil Indeks IGI.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjadikan bangsa yang memiliki kesejahteraan masyarakat yang makmur adalah bagian dari terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia yang termuat di dalam Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu usaha yang dilakukan untuk mendatangkan kesejahteraan tergolong hakekat pada pembangunan nasional yang diharapkan bisa mengarah dalam keadaan yang seimbangan, serasi dan selaras pada kehidupan masyarakat.

Pada umumnya ekonomi masyarakat memiliki keunggulan untuk lebih bertumbuh, apabila semua golongan bangsa menyadari pentingnya pemerataan sebagai wujud dalam keadilan sosial. Artinya perlu benar-benar digarap ekonomi masyarakat kecil yang selama ini tertekan, apabila sejauh ini pembangunan yang dilangsungkan condong berformalisasi oleh karena semua penyebabnya telah ditetapkan serta diatur oleh pusat, sehingga dalam pembangunan yang memihak masyarakat menuntut seluruh perencanaan keputusan serta pelaksanaan dilangsungkan masyarakat sendiri. (Kesejahteraan)

Kuncoro, (2002) berpendapat sesungguhnya pemerintah hendak melakukan semacam kebijakan pembangunan daerah berlandaskan keunggulan yang dipunyai oleh seluruh wilayah untuk memperketat ketimpangan wilayah. Pada dasarnya, perubahan konsep serta kekuasaan wilayah dilaksanakan berlandaskan pemusatan kebijakan pusat, tetapi kemudian akan dianjurkan agar setiap wilayah mampu

independen saat mengatur wilayahnya serta menciptakan kebijakan-kebijakan pembangunan wilayahnya sendiri.

Pertumbuhan ekonomi dimanfaatkan sebagai sarana dalam meraih kesejahteraan serta menjadi bagian dari aspek guna mencapai kesuksesan pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan daerah bukan hanya sekedar dipengaruhi dalam pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun kemampuan wilayah dalam menyelesaikan berbagai permasalahannya diantaranya yaitu masalah pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan antar golongan. Disisi yang berbeda, dengan keadaan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dapat menjamin seseorang untuk memperoleh keistimewaan dalam bentuk serupa. bertambahnya kesenjangan pendapatan bisa memperlambat laju penyusutan level kemiskinan serta dapat mengurangi taraf pertumbuhan ekonomi. Akibat dari kesenjangan pendapatan akan menimbulkan kesenjangan yang nantinya akan memicu kejahatan atau kriminalitas hal ini lah yang akan menghambat laju penurunan tingkat kemiskinan dan juga dapat mempengaruhi terhadap pengurangan tingkat pertumbuhan ekonomi. (Hapsari 2019).

Pertumbuhan adalah syarat penting bagi terwujudnya pertumbuhan inklusif (Shaleh, 2021). Pertumbuhan inklusif adalah bagian tujuan dalam pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Pertumbuhan inklusif yang berkelanjutan dalam artian global mencakup kenaikan produksi, pendapatan, serta penyebaran pendapatan/ pengeluaran (Suryanarayana, 2013). Oleh karena itu, pembangunan dan pertumbuhan suatu regional dikatakan inklusif jika pembangunan tersebut melibatkan segala golongan masyarakat serta dampaknya

bisa dinikmati secara menyeluruh (Klasen, 2010). Selain meningkatnya laju pertumbuhan serta perluasan ekonomi, pertumbuhan inklusif beriringan dengan meningkatnya kesempatan kerja produktif serta pemerataan penanaman modal (World Bank, 2009).

Hal tersebut menjadikan parameter pertumbuhan inklusif bukan hanya berbentuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi melainkan juga diantaranya yaitu tingkat kemiskinan yang rendah, terwujudnya persebaran secara merata pendapatan, dan menurunnya tingkat pengangguran. Kemudian, supaya pertumbuhan tersebut berkelanjutan sampai di masa yang akan mendatang sehingga pertumbuhan harus bersifat global di beragam sektor dan dapat melibatkan mayoritas angkatan kerja yang tersedia. Konsep ini berlainan dengan analisis pertumbuhan ekonomi yang *pro poor growth*, yang mana hanya terkonsentrasi pada dampak pertumbuhan terhadap menurunnya penduduk miskin (World Bank, 2009). Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan analisis pertumbuhan ekonomi yang *pro poor growth*, yang dimana hanya fokus pada dampak dari pertumbuhan terhadap pengurangan penduduk miskin (World Bank, 2009).

Diperoleh sejumlah argumen luar biasa apa alasan pertumbuhan ekonomi perlu inklusif menurut Asian Development Bank (2011) yaitu: (i) Pertimbangan kesetaraan serta keadilan, pertumbuhan sebaiknya tersebar serta inklusif di segala golongan suatu masyarakat serta wilayah. (ii) Pertumbuhan dengan kesenjangan yang persisten bisa mengkhawatirkan keadaan sosial, sebagaimana penduduk miskin / kurang mampu dan pengangguran lebih rentan masuk kedalam kegiatan

kejahatan, perempuan lebih rentan ke prostitusi, serta tenaga kerja anak yang tidak diharapkan. (iii). Kesenjangan didalam hasil dan akses yang berkelanjutan dapat mengganggu kestabilan politik serta struktur sosial akibatnya dapat menurunkan potensi pertumbuhan yang berkelanjutan. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif adalah media guna menilai serta mengamati sejauh mana level inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota (Bapenas).

Tabel 1. 1 Kemiskinan Provinsi di Indonesia, KTI, KBI, dan 13 Provinsi Kawasan Indonesia Timur Tahun 2017-2021

Provinsi	Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi (Persen)				
	2017	2018	2019	2020	2021
KTI	14.85	14.32	13.94	13.63	13.94
KBI	9.13	8.63	8.3	8.44	10.14
Bali	4.25	4.01	3.79	3.78	4.53
Nusa Tenggara Barat	16.07	14.75	14.56	13.97	14.14
Nusa Tenggara Timur	21.85	21.35	21.09	20.9	20.99
Sulawesi Utara	8.1	7.8	7.66	7.62	7.77
Sulawesi Tengah	14.14	14.01	13.48	12.92	13
Sulawesi Selatan	9.38	9.06	8.69	8.72	8.78
Sulawesi Tenggara	12.81	11.63	11.24	11	11.66
Gorontalo	17.65	16.81	15.52	15.22	15.61
Sulawesi Barat	11.3	11.25	11.02	10.87	11.29
Maluku	18.45	18.12	17.69	17.44	17.87
Maluku Utara	6.35	6.64	6.77	6.78	6.89
Papua Barat	25.1	23.01	22.17	21.37	21.84
Papua	27.62	27.74	27.53	26.64	26.86
Indonesia	10.64	9.82	9.78	9.41	10.14

Sumber: BPS

Kawasan Timur Indonesia (KTI) yaitu kawasan yang terdiri dari lima pulau yaitu Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Sedangkan Kawasan Barat Indonesia (KBI) yaitu kawasan yang terdiri dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Kepulauan Bangka dan Riau. Selama periode 2017-2021 rata-rata tingkat penduduk miskin di Indonesia sebesar 9.96% pada KBI sebesar 8.93% sedangkan pada KTI sebesar 14.14% dari ke 13 Provinsi yang termasuk dalam KTI, Papua menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Pada tahun 2017-2021 rata-rata penduduk miskin Papua mencapai 27.28% yang mengartikan bahwa penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan yaitu di tahun 2021 sebanyak 920,44 ribu jiwa (Indrawati et al., 2019).

Saat mengukur kesejahteraan masyarakat salah satunya bisa dinilai melalui pertumbuhan ekonominya. Yang mana semakin tingginya pertumbuhan ekonomi membuktikan jika pendapatan di suatu daerah bakal meningkat serta nantinya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat guna memenuhi keperluan hidupnya, artinya pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh turunan ke bawah atau trickle down effect di perekonomian suatu daerah. Namun dalam penelitian Anzwar (2016:10) berpendapat mayoritas negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia, meski ditingkat nasional ataupun regional, hanya terdapat suatu golongan masyarakat tertentu saja yang menjadi penyokong terbesar dalam pertumbuhan ekonomi yang mendatangkan adanya kegunaan dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri tidak bersifat inklusif yang nantinya akan mendatangkan memperparah keadaan kemiskinan dan ketimpangan.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua di Kabupaten memperlihatkan kesejangan. Yaitu Kabupaten Mimika yang pertumbuhannya sangat tinggi dibandingkan dengan kabupaten atau kota lainnya. Karena keadaan wilayah Kabupaten Mimika tersebut mempunyai potensi daerah di sektor pertambangan dengan adanya PT Freeport, maka Kabupaten Mimika mempunyai pendapatan daerah terbilang tinggi. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua kebanyakan disangga oleh pendapatan sektor pertambangan yaitu pada 2021 sebesar 40,30% diikuti sektor konstruksi 12,14% dan sektor pertanian sebesar 10,56%. Selanjutnya, di tiap-tiap kabupaten / kota di Papua periode tahun 2017-2021 pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi. Diketahui bahwa, di Kabupaten Mimika menjadi kabupaten dengan penyumbang PDRB terbesar dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya selama 2017-2021 yaitu sebesar 36,44% dari total PDRB Papua, keadaan ini berkaitan dengan pendapatan PDRB Kabupaten Mimika yang sebagian besar disangga oleh sektor pertambangan, yang dimana seperti kita ketahui PT Freeport Indonesia terletak di kabupaten Mimika.

Tabel 1. 2 Distribusi PDRB Kabupaten dan Kota Terhadap Total PDRB Kabupaten dan Kota Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2017-2021 (Persen)

Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021
Merauke	5,97	5,99	7,58	7,33	6,46
Jayawijaya	2,86	2,82	3,49	3,30	2,90
Jayapura	5,82	5,82	7,35	6,98	6,36
Nabire	4,54	4,45	5,48	5,28	4,79
Kabupaten Yapen	1,78	1,73	2,13	1,99	1,81
Biak Numfor	2,25	2,10	2,52	2,34	2,08

Paniai	1,84	1,82	2,22	2,18	1,92
Puncak Jaya	0,63	0,61	2,22	0,70	0,61
Mimika	45,35	46,39	33,58	36,5	43,37
Boven Digoel	2,10	2,01	2,42	2,29	2,00
Mappi	1,12	1,11	1,39	1,34	1,19
Asmat	0,92	0,91	1,12	1,10	0,97
Yahukimo	0,93	0,91	1,12	1,10	0,97
Peg Bintang	0,86	0,84	1,04	1,01	0,90
Tolikara	0,65	0,63	0,77	0,76	0,67
Sarmi	1,10	1,08	1,35	1,32	1,16
Keerom	1,24	1,20	1,46	1,43	1,28
Waropen	0,90	0,89	1,11	1,05	0,93
Supiori	0,47	0,46	0,56	0,55	0,49
Mamberamo Raya	0,61	0,60	0,75	0,73	0,64
Nduga	0,48	0,47	0,58	0,57	0,51
Ianny Jaya	0,71	0,69	0,85	0,85	0,75
Mamberamo					
Tengah	0,46	0,45	0,55	0,54	0,48
Yalimo	0,45	0,45	0,56	0,55	0,49
Puncak Jaya	0,50	0,49	0,61	0,59	0,52
Dogiyai	0,54	0,53	0,66	0,64	0,56
Intan Jaya	0,49	0,46	0,56	0,54	0,48
Deiyai	0,52	0,50	0,61	0,60	0,52
Kota Jayapura	13,91	13,61	16,84	15,87	14,22

Berdasarkan penjelasan penelitian tersebut penting dilangsungkan guna menganalisis pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Provinsi Papua atau dikenal sebagai Inclusive Growth Index (IGI). Dengan menggunakan indeks ini, dapat

dinilai kualitas pertumbuhan ekonomi inklusif yang telah dicapai serta indikator yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif sebagai gambaran kesuksesan pembangunan ekonomi. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi tolok ukur untuk perkembangan ekonomi di Provinsi Papua di masa mendatang.

Seperti yang kita ketahui bahwa wilayah Indonesia bagian Timur pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia bagian Barat. Terkhususnya Provinsi Papua menduduki peringkat terendah dalam indeks pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia.

1.2 Perumusan Masalah

Bagaimana pertumbuhan ekonomi inklusif di Provinsi Papua?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi inklusif di Provinsi Papua.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Panelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan mengenai pertumbuhan ekonomi inklusif dan juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

Manfaat Empiris

Peneliti berharap penelitian ini dapat memudahkan untuk peneliti yang ingin meneliti hal serupa dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Ngurah Gede, W. (2022). Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Berwawasan Lingkungan di Indonesia. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 6(3), 262–275.
<https://doi.org/10.29244/jp2wd.2022.6.3.262-275>
- BAPPEDA & BPS DIY. (2016). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Daerah Istimewa Yogyakarta 2011-2015. *Laporan Akhir BAPPEDA DIY*, III.
- Bustaman, N., Yulyanti Shinta, & Dewi, S. K. (2021). *Analisis Faktor-Faktor...{Bustamam, dkk }*. 32(1), 85–92.
<https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat>
- Chotimah, R. N. F. K., & Arnida, O. V. (2022). Analisis Dampak Kebijakan Makroekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2015-2020. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 7(1), 92–106.
- Hapsari, W. R. (2019). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan*, 3(1), 11. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v3i1.121>
- Indrawati, I., Sarfiah, S. N., & Destiningsih, & R. (2019). *Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi Papua Tahun 2014-2019 Analyze The Impact Of Economic Growth , Inequality In Income Distribution , And The Human Development Index On. 2*, 1068–1080.
- Khoirunnisa, S. A., & Saelangi, P. M. (2022). Konsep Kesejahteraan dalam Pandangan Ekonomi Muslim: Kritik atas Konsep Kesejahteraan Ekonomi

- Barat. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 2(1), 51.
<https://doi.org/10.30984/ajiel.v2i1.1991>
- (Komarudin, 2015. (2013). *Latar Belakang Masalah Sepakbola*. 23(3), 1–10.
- Kusumaningrum, S., & Yuhan, R. J. (2019). Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia Berdasarkan Indeks Komposit Pertumbuhan Inklusif dan Faktor yang Memengaruhinya. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 10(1), 1–17.
<https://doi.org/10.22212/jekp.v10i1.1150>
- Maryam, S., & Irwan, M. (2022). Indeks Pembangunan/Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Di Nusa Tenggara Barat. *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4(1), 121–141.
<https://doi.org/10.29303/e-jep.v4i1.60>
- Melmambessy, D. (2022). JURNAL EKONOMI & BISNIS Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 13, 10–15.
- Mohanty et al., 2005. (2016). 事業所における定期健康診断受診者の健康習慣実行度とストレス反応の因子構造－健康習慣指数と職業性ストレス反応の主成分分析を試みて－ 田甫久美子 **View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk.** *PENGARUH PENGGUNAAN PASTA LABU KUNING (Cucurbita Moschata) UNTUK SUBSTITUSI TEPUNG TERIGU DENGAN PENAMBAHAN TEPUNG ANGKAK DALAM PEMBUATAN MIE KERING*, 15(1), 165–175.
<https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>

- Mutia Fajri Sirega, Anisah Nasution, Putri Madinah, Zafira sabrina, & Maulida Ummi Zakia. (2022). Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif. *Journal of Management and Creative Business*, 1(1), 52–62. <https://doi.org/10.30640/jmcbus.v1i1.483>
- Prasetyia, F. (2021). Kualitas Pemerintahan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Jawa Timur. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 5(1), 21–34. <https://doi.org/10.31685/kek.v5i1.581>
- Rahmawati, A., Lutfiani, L., Yunia, Z. R., Rofiqoh, I., Zahrok, F. F., & Wahyuningtyas, D. (2021). Dampak Pandemic Covid- 19 Terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Jawa Timur Indikator Tingkat Kemiskinan Dan Ketimpangan. *Efektor*, 8(1), 79–88. <https://doi.org/10.29407/e.v8i1.15708>
- Shaleh, M. M. (2021). Pembangunan Ekonomi Inklusif Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan. *Equilibrium*, 10(1), 24–43. <https://journal.stiem.ac.id/index.php/jureq/article/view/741>
- Bappeda Provinsi Papua. (2020). Laporan Infografis Hasil Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2020. *Laporan Bappeda Papua*, 40. <https://bappeda.papua.go.id/file/456187359.pdf>
- Diaurrochmah, F., & Mulyanto, M. (2021). Analisis Indeks Pertumbuhan Inklusif Di Kawasan Barat Indonesia Dan Kawasan Timur Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 8(2), 178–195. <https://doi.org/10.24815/ekapi.v8i2.26570>
- Kusumaningrum, S., & Yuhan, R. J. (2019). Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia Berdasarkan Indeks Komposit Pertumbuhan Inklusif dan Faktor yang Memengaruhinya. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 10(1), 1–17. <https://doi.org/10.22212/jekp.v10i1.1150>
- Mirah, M. R., Kindangen, P., & Rorong, I. P. F. (2020). 32815-68547-1-Sm.

Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah, 21(1), 85–100.
<https://ejournal-unipra.com/index.php/IMKP/article/view/116>

Rahayu, Y. P., Waimbo, D. E., & Kabiay, M. (2019). Evaluasi kebijakan pro masyarakat miskin (studi kasus program raskin di Kabupaten Manokwari). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22(1), 121–146.
<https://doi.org/10.24914/jeb.v22i1.2125>

Sri Hartati, Y. (2022). Analisis Ketimpangan Ekonomi Di Provinsi Papua. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 14(2), 19–29. <https://doi.org/10.55049/jeb.v14i2.116>

<https://bem.feb.ugm.ac.id/dampak-kebijakan-pembangunan-di-papua-terhadap-kesejahteraan-masyarakat-papua-kajian-aspek-ekonomi-dan-sosial/>